

*Filsafat Sosial*  
**AL – MAWARDI**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Filsafat Islam

Oleh:

**Mohammad Alfuniam**  
NIM. 99513008

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

**Drs. H. Moh. Fahmi Muqoddas M. Hum**  
**Alim Ruswantoro, S.Ag, M.Ag**  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
-----

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Alfuniam  
Lamp. : 6 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami selaku pembimbing, setelah melakukan koreksi secukupnya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Mohammad Alfuniam**

NIM : 99513008

Jurusan : Aqidah Filsafat

Judul : Filsafat Sosial al-Mawardi

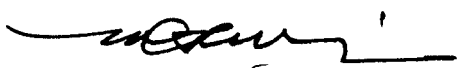
Maka, skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan di hadapan siding munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

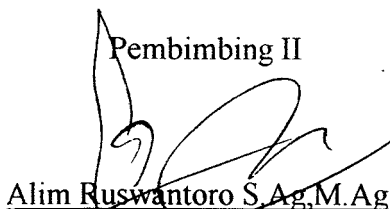
Yogyakarta, 27 Oktober 2003

Pembimbing I



Drs.H.Moh.Fahmi Muqoddas M.Hum  
NIP : 150 088 748

Pembimbing II



Alim Ruswantoro S.Ag.M.Ag  
NIP : 150 289 262



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax (0274) 512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/828/2003

Skripsi dengan judul : *Filsafat Sosial al-Mawardi*

Diajukan oleh :

1. Nama : **Mohammad Alfuniam**
2. NIM : 99513008
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

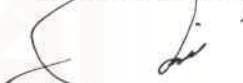
Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 13 November 2003 dengan nilai : **80 ( B+)** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Strata 1 dalam ilmu : Ushuluddin

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**


Ketua Sidang

  
Drs. H. Fauzan Naif, MA  
NIP. 150 228 609


Sekretaris Sidang

  
Drs. Rahmat Fajri  
NIP. 150 275 041

Pembimbing

  
Drs. HM. Fahmie, M.Hum  
NIP. 150 088 748

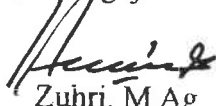
Pembantu Pembimbing

  
Alim Roswanto, M.Ag  
NIP. 150 289 262

Penguji I

  
Drs. H. Fauzan Naif, MA  
NIP. 150 228 609

Penguji II

  
Zuhri, M.Ag  
NIP. 150 318 017

Yogyakarta, 13 November 2003

DEKAN

  
Drs. HM. Fahmie, M.Hum  
NIP. 150 088 748



## KATA PENGANTAR

Seringkali dalam perbincangan dengan teman-teman saya selalu bilang bahwa menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan merupakan dua hal yang berbeda, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya arah pendidikan yang digagas oleh bangsa kita, sebenarnya mau dibawa kemana generasi penerus kita.

Dalam realitas seringkali kita temukan lulusan sebuah lembaga pendidikan bekerja dalam ruang lingkup yang tidak pada mestinya, saya punya teman yang lulusan filsafat tetapi menjadi “dukun” Hp meskipun proses berfilsafatnya tidak berhenti, ada lagi yang lulusan syari’ah malah akhirnya bisnis kaos, hal ini membuktikan bahwa memang pendidikan dan pekerjaan kususny di negara kita merupakan dua hal yang berbeda.

Kesadaran diatas sudah menjadi “nalar” saya, maka ketika dulu memilih jurusan AF, berbagai gunjingan dari banyak orang tidak saya ambil pusing, karena memang saya kuliah bukan mau bekerja apa, mungkin agak idealis, saya ingin mencari makna hidup, alhamdulillah meskipun tidak seperti yang saya bayangkan dulu, minimal saya sekarang lebih toleran terhadap perbedaan dan lebih bisa menyikapi kehidupan.

Yang jadi masalah ketika mahasiswa kurang memahami nalar di atas dan terlalu mengawang dalam ruang idealisme, seringkali pendidikan yang sudah tidak jelas semakin menjadi tidak karuan, terutama bagi para aktifis yang kurang perencanaan, sudah kuliahnya terlambat lulus, masa depannya nggak jelas lagi,

apalagi di era demokrasi seperti sekarang ini, ketika tidak ada yang namanya kekuatan dan kebenaran tunggal.

Lepas dari berbagai gerundelan di atas, bagaimanapun tidak jelasnya pendidikan kita dan kurang nyambungannya antara pendidikan dan pekerjaan, lulus tetap penting karena kita masih hidup di dunia nyata yang membutuhkan eksistensi dan status, memang sarjana bukanlah segala-galanya, namun bagaimanapun juga lulus adalah sebuah keharusan dan itu penting. Berangkat dari itu semua mengapa skripsi ini mesti ada.

Untuk itu dalam kesempatan ini kiranya perlu kami ucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, bapak Drs.H. M. Fahmi Muqoddas M.Hum dan bapak Alim Ruswantoro S.Ag, M.Ag karena ditengah kesibukannya beliau berdua masih rela menyisihkan waktunya untuk membimbing saya, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak Subagyo M.Ag selaku pembimbing akademik yang seringkali memberikan masukan dan pandangan, selanjutnya perlu juga kiranya kami ucapkan terima kasih kepada bapak Muzairi, MA dan bapak Basir Solissa selaku Ka.Jur dan Sek.jur AF, tanpa partisipasi beliau berdua rasanya skripsi ini tidak akan selesai pada waktunya.

Dan kurang sempurna kiranya ketika ucapan terima kasih tidak saya sampaikan kepada segenap sahabat-sahabat, KMF, KAMABA, Asrama Putra, PMII, IPNU dan kelas AF I yang namanya tidak mungkin disebutkan satu-persatu, karena kepada merekalah selama ini saya berdialektika dan bersosialisasi. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini

## ABSTRAKSI

Dalam konteks sejarah sosial, masyarakat dibentuk --dan membentuk dengan sendirinya-- dengan tujuan untuk saling menguatkan dan mewujudkan sebuah komunitas yang tertib dan permanen. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan sikap kebersamaan dengan manusia lainnya untuk mempertahankan dirinya. Sikap berkelompok tersebut menurut Thomas Aquinas memang bersumber dari Tuhan, itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Interaksi sosial terbangun secara genetis dan geografis hingga muncul sebuah kesadaran bersama akan pentingnya suatu ikatan sosial guna mengatur berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah interaksi tersebut. Dengan demikian, dalam masyarakat terkandung makna komunitas, sistem organisasi, peradaban dan interaksi sosial yang dalam sosiologi merupakan inti dari suatu komunitas masyarakat

Secara alamiah manusia terlahir dalam keadaan bebas dan merdeka, namun pada kenyataannya ia terkungkung dan terbelenggu oleh realitas sosial politik (*conditio sine qua non*) Dengan demikian setiap insan di dunia hidup dalam jaringan sosial politik yang dinamakan negara. Seorang individu tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari status sosial maupun politiknya dimana ia dilahirkan.

Sebagai salah satu icon penting dalam konstruksi tata hubungan masyarakat dan sebagai sebuah agama, Islam selalu dituntut untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip etika universalnya. Sebab disadari bahwa agama sebetulnya mempunyai peran strategis dalam mengembangkan etika sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, berarti Islam tidak saja dikembangkan dalam area pemikiran murni spekulatif, tetapi juga harus ditempatkan sebagai dasar etika sosial dimana praksis sosial digerakkan. Sebagai sesuatu yang mengusung nilai-nilai, agama dengan demikian sudah selayaknya untuk terus dieksplorasi makna-maknanya secara kontekstual guna diperjuangkan dalam tata kehidupan umat manusia.

Dalam konstalasi alam pikiran diatas, sebagai pemikir Islam yang hidup pada Abad XI M., al-Mawardi mencoba merumuskan suatu konsep filsafat sosial dan teori kontrak sosial. Menurut al-Mawardi manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk lainnya. Banyak binatang yang mampu hidup mandiri lepas dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain, dan interaksinya merupakan sesuatu yang tetap dan permanen. Bentuk kontrak sosial yang ditawarkan oleh al-Mawardi adalah kebutuhan manusia untuk mendirikan suatu negara. Negara merupakan hajat manusia untuk memenuhi kebutuhan bersama dan membangun ikatan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, Berangkat dari dasar pemikiran diatas skripsi ini akan dibahas.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	18
BIOGRAFI INTELEKTUAL DAN SOSIAL POLITIK	
AL-MAWARDI	18
A. Riwayat Hidup dan Pendidikan	18
B. Kondisi Sosial Politik	22
C. Karya-karya al-Mawardi	29
BAB III	33
SEJARAH DAN DEFINISI FILSAFAT SOSIAL	33
A. Pengertian Filsafat Sosial	33
B. Sejarah Singkat Filsafat Sosial	36
1. Tinjauan Singkat Filsafat Sosial Barat	36
2. Tinjauan Singkat Filsafat Sosial Dalam Islam	41

BAB IV	PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG FILSAFAT SOSIAL.....	49
	A. Filsafat Sosial al-Mawardi.....	49
	1. Dimensi Sosialitas Manusia Menurut Al-mawardi.....	49
	a. Relasi Antar manusia .....	49
	b. Relasi Manusia dengan Lingkungan dan Tuhan.....	53
	2. Kedudukan dan Peran Agama dalam Filsafat Sosial al-Mawardi .....	56
	a. Akal dan Nafsu bagi Manusia.....	57
	b. Etika Sosial Keagamaan dalam konstruksi Masyarakat.....	60
	B. Konstruksi Filsafat Sosial al-Mawardi.....	62
	1. Negara Sebagai Wujud Kontrak Sosial.....	63
	2. Bentuk Kepemimpinan Sosial dan Partisipasi Masyarakat.....	68
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan .....	72
	1. Filsafat Sosial al-Mawardi.....	72
	2. Peran dan Fungsi Agama dalam Konstruksi Sosial Masyarakat.....	73
	B. Saran-saran .....	74
	DAFTAR PUSTAKA .....	76
	CURRICULUM VITAE .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah manusia terlahir dalam keadaan bebas dan merdeka, namun pada kenyataannya ia terkungkung dan terbelenggu oleh realitas sosial politik (*conditio sine qua non*)<sup>1</sup>. Dengan demikian setiap insan di dunia hidup dalam jaringan sosial politik yang dinamakan negara. Seorang individu tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari status sosial maupun politiknya dimana ia dilahirkan.

Dalam konteks sejarah sosial, masyarakat dibentuk --dan membentuk dengan sendirinya-- dengan tujuan untuk saling menguatkan dan mewujudkan sebuah komunitas yang tertib dan permanen. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan sikap kebersamaan dengan manusia lainnya untuk mempertahankan dirinya. Sikap berkelompok tersebut menurut Thomas Aquinas memang bersumber dari Tuhan, itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial.<sup>2</sup>

Sistem sosial tertua dari komunitas manusia dan satu-satunya yang bersifat alami adalah keluarga. Dalam keluarga terjalin pola relasi simbiosis-mutualisme dimana antara anggotanya saling membutuhkan. Namun ketika kebutuhan tersebut telah terpenuhi dan berhenti maka yang terjadi adalah kebebasan di antara mereka. Jika mereka tetap bersatu, hal itu tidak terjadi secara alami lagi, tetapi lebih

---

<sup>1</sup> Ito Prajna Nugroho, *Dilema Negara-Bangsa dalam Perspektif Hannah Arendt* ( Jakarta: *Jurnal Filsafat Driyarkara*, edisi Th. XXVI, No.1, 2002), hlm. 96.

<sup>2</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat* ( Jakarta: Rajawali Pers, 1997 ), hlm. 32.

didasarkan atas kesepakatan dan sukarela. Jadi keluargapun sebenarnya hanya dapat bertahan atas dasar konvensi.<sup>3</sup>

Interaksi sosial terbangun secara genetis dan geografis hingga muncul sebuah kesadaran bersama akan pentingnya suatu ikatan sosial guna mengatur berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah interaksi tersebut. Dengan demikian, dalam masyarakat terkandung makna komunitas, sistem organisasi, peradaban dan interaksi sosial yang dalam sosiologi merupakan inti dari suatu komunitas masyarakat.<sup>4</sup>

Adalah sudah menjadi watak manusia di antara mereka saling berebut dalam pemenuhan kebutuhan karena permusuhan dan kezaliman merupakan watak hewani yang dimiliki manusia. Dan tidaklah mungkin manusia melakukan aktivitas seorang diri, demikian pula setiap orang membutuhkan bantuan orang lain. Karena proses mempertahankan hidup tersebut, manusia memerlukan kerjasama dalam rangka menjaga eksistensinya, maka negara menjadi suatu keharusan bagi manusia ( *Al-ijtima' dharuuriyyun li an-naw'i al-insaani* ) tanpa adanya negara eksistensi manusia tidak akan sempurna. Dengan sendirinya orang yang melaksanakan kewibawaan itu harus menguasai mereka dan memiliki kekuatan melebihi mereka untuk mengatur pelaksanaan kesepakatan bersama, inilah yang dinamakan "kekuasaan / otoritas" ( *Mulk* ) atau kedaulatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jean-Jacques, *Du Contrat Social, Perihal Kontrak Sosial* terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat ( Jakarta: Dian Rakyat, 1989 ), hlm 4.

<sup>4</sup> Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam, Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi* ( Bandung: Rosda, 2001 ), hlm. 5.

<sup>5</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000 ), hlm. 72-74.

Diskursus tentang negara sebagai produk sosialitas manusia tidak akan pernah usang, selama masih ada kehidupan, maka keberadaan dan eksistensi negara akan tetap dibahas dan diperdebatkan, apalagi di zaman mutakhir seperti sekarang ini. Alasannya sangat jelas dan sederhana, tidak ada seorang pun di dunia ini yang terbebas dari jari-jemari kekuasaan negara (*state*). Lebih-lebih di negara dunia ketiga, dapat dirasakan langsung betapa wilayah kekuasaan itu sedemikian menyeluruhnya. Negara seakan menjadi pemeran sifat kemahakuasaan Tuhan sebagai *al-Mukhit*, dzat yang maha meliputi.<sup>6</sup>

Tidak ada lagi *private sphere*, dimana individu bebas melakukan aktivitasnya. Di tengah samudra, dalam hutan belantara sampai di ruang-ruang kelas, negara selalu ada disana, bahkan negara hadir dalam komunitas yang paling kecil dan terbatas, keluarga.

Negara<sup>7</sup> merupakan institusi yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekuatan fisik dalam melaksanakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkan.

Kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan manifestasi dari kepentingan umum. Sebagai institusi yang mewakili kepentingan

---

<sup>6</sup> Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Amiruddin Ar-Rani ( Yogyakarta: LKiS, 2000 ), hlm.V.

<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Ne.ga.ra diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara adalah kelompok social yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif,

umum, negara dapat melaksanakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat. Karena alasan inilah Max Weber kemudian mendefinisikan negara sebagai “institusi kemasyarakatan yang (*berhasil*) memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik disuatu daerah tertentu”.<sup>8</sup>

Senada dengan pernyataan tersebut sebagaimana tercantum dalam *Manifesto Komunis dan Eighteen Baumeire*, Althusser cenderung memandang negara yang dibangun atas dasar kekuasaan yang ada padanya merupakan wujud dominasi politik atas masyarakat dan negara selalu ada di atas masyarakat.<sup>9</sup>

Mungkin, ada institusi selain negara yang sanggup menggunakan kekerasan fisik untuk melaksanakan kepentingannya, seperti komplotan penjahat dalam suatu aksi mereka.<sup>10</sup> Tetapi mereka tidak memiliki “*keabsahan*” untuk melaksanakannya, karena mereka melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan perorangan atau kelompok bukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, seperti halnya negara. Sebab itu jika suatu negara kehilangan keabsahannya, dia akan sama seperti kelompok penjahat dalam memaksakan kepentingannya dengan kekerasan.

Sesungguhnya, negara yang menurut istilah Ibnu Khaldun dikatakan organisasi kemasyarakatan (*Ijtima' Insani*) umat manusia adalah sebuah keharusan. Para filosof telah melahirkan kenyataan bahwa “Manusia adalah bersifat politis

---

mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya: kepentingan Negara- lebih penting daripada kepentingan perorangan.

<sup>8</sup> Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideolog* ( Jakarta: Gramedia, 2002 ), hlm. 3.

<sup>9</sup> Hari Cahyadi, Tim Redaksi Driyarkara, *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* ( Jakarta: Gramedia, 1993 ), hlm. 54.

<sup>10</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, alih bahasa Ahmad Baidlowi & Imam Bachaqi ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 ), hlm. 280.

menurut tabiatnya” ( *al-Insanu madaniyyun bi ath-thab'i* ). Ini berarti, ia memerlukan suatu organisasi kemasyarakatan, yang menurut para filosof dinamakan “kota” ( *al-Madinah, Polis* ).<sup>11</sup>

Sejalan dengan Plato dan Aristoteles, al-Farabi, seorang pemikir politik Islam idealis berpendapat bahwa manusia adalah mahluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat lantaran tidak mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Tujuan bermasyarakat bagi al-farabi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, melainkan juga untuk memenuhi kelengkapan hidup yang akan memberikan kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spiritual, dan bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat kelak.<sup>12</sup>

Menurut Thomas Hobbes, pada awalnya masyarakat dalam kondisi *Bellum Omnium Contra Omnes*, yaitu peperangan dan persaingan yang brutal dalam meraih kekuasaan dan kedudukan. Segala lawan dari setiap orang melawan orang lain yang tak dapat dihindarkan, maka orang-orang dalam sebuah komunitas membuat kontrak antara sesama untuk tunduk dan patuh kepada otoritas dominan berbentuk negara atas kesepakatan bersama, dengan demikian anggota masyarakat akan mendapat perlindungan dan kemungkinan kehidupan yang manusiawi.<sup>13</sup>

Dalam pandangan Locke, keadaan pra-negara atau keadaan alamiah bukan seperti yang dilihat oleh Hobbes sebagai keadaan perang antar sesama, tetapi suatu

---

<sup>11</sup> Ibnu Khaldun, op.cit., hlm. 71.

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Jakarta: UI Press, 1993 ), hlm. 51.

<sup>13</sup> Jean-Jacques Rousseau, op.cit., hlm. xi.

masyarakat yang diatur oleh hukum kodrat. Dalam hal ini ada transformasi “keadaan alamiah” (*status naturalis*) kepada “masyarakat alamiah” (*societas naturalis*).<sup>14</sup> Locke sebagaimana Hobbes, berpendapat bahwa pembentukan masyarakat politik atau negara didahului oleh suatu keadaan alamiah di mana individu memiliki hak-hak azasi atau kodrati. Bertolak dari teori-teori kodrat manusia tersebut, hobbes beranggapan bahwa negara yang kuat dan berkekuasaan mutlak itu perlu.

Terbentuknya suatu otoritas sosial-politik atas kesepakatan bersama yang sering disebut negara didahului oleh keberadaan individu yang memiliki hak-hak kodrati. Keadaan ini oleh Locke disebut keadaan alamiah (*state of nature*).<sup>15</sup> Keadaan alamiah ini adalah keadaan kebebasan (*state of liberty*), tetapi bukan keadaan dimana orang berbuat sekehendaknya (*state of license*). Individu terikat oleh kewajiban kepada Tuhan dan diatur oleh “hukum kodrat” (*law of nature*) yang menentukan prinsip-prinsip dasar moralitas: individu tidak boleh mengakhiri hidupnya sendiri; individu harus saling memelihara dan tidak boleh melanggar kebebasan orang lain.

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah, karenanya Tuhan membekali potensi intelektual kepada manusia yang akan menuntunnya berperilaku tertentu dan yang akan membimbing menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perbedaan intelegensia, intelektual, kepribadian dan bakat antara manusia justru

---

<sup>14</sup> John Locke, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Essai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, alih bahasa A. Widyamartaya ( Yogyakarta: Kanisius, 2002 ), hlm. 9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

mendorong untuk saling bekerjasama. Karena adanya unsur saling bisa bekerjasama ini, manusia akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Negara merupakan hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama dan keahlian mereka yang mengajarkan bagaimana saling membantu dan bagaimana mengatur ikatan dalam interaksi sosial satu sama lain.<sup>16</sup>

Sebagai salah satu icon penting dalam konstruksi tata hubungan masyarakat dan sebagai sebuah agama, Islam selalu dituntut untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip etika universalnya. Sebab disadari bahwa agama sebetulnya mempunyai peran strategis dalam mengembangkan etika sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, berarti Islam tidak saja dikembangkan dalam area pemikiran murni spekulatif, tetapi juga harus ditempatkan sebagai dasar etika sosial dimana praksis sosial digerakkan. Sebagai sesuatu yang mengusung nilai-nilai, agama dengan demikian sudah selayaknya untuk terus dieksplorasi makna-maknanya secara kontekstual guna diperjuangkan dalam tata kehidupan umat manusia.<sup>17</sup>

Dalam konstalasi alam pikiran di atas, sebagai pemikir Islam yang hidup pada Abad XI M., al-Mawardi mencoba merumuskan suatu konsep filsafat sosial dan teori kontrak sosial. Menurut al-Mawardi manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk lainnya. Banyak binatang yang mampu hidup mandiri lepas dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain, dan interaksinya merupakan sesuatu yang tetap dan permanen. Bentuk kontrak sosial yang ditawarkan oleh al-Mawardi adalah

---

<sup>16</sup> Muhammad Azhar, *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>17</sup> Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang, 2001), hlm. VII.



kebutuhan manusia untuk mendirikan suatu negara. Negara merupakan hajat manusia untuk memenuhi kebutuhan bersama dan membangun ikatan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela.<sup>18</sup>

Menurut al-Mawardi, keadaan masyarakat sebelum terbentuknya sebuah negara berada dalam situasi chaos. Maka untuk membangun ketertiban sosial dan menghindari chaos diperlukan suatu perangkat sosial yang dapat mengatur masyarakat untuk menghindari kekacauan tersebut.<sup>19</sup> Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membentuk sebuah komunitas yang tertib berdasarkan kontrak sosial dan kontrak sosial tersebut dapat dilakukan dengan mengangkat seorang pemimpin negara.

al-Mawardi mengartikan pemimpin / khalifah sebagai pengganti kedudukan Nabi dalam hal melestarikan agama dan menyelenggarakan kepentingan duniawi. Dengan demikian fungsi seorang pemimpin dalam menggantikan posisi nabi adalah dalam rangka menjadi kepala masyarakat secara sosial dengan tugas memelihara agama dan menyelenggarakan kepentingan duniawi. Tugas keduniawiaan meliputi ketertiban dan keamanan yang dalam bahasa politik disebut fungsi stabilisator dari negara. Tugas-tugas lain yang tercakup dalam kewajiban pemimpin adalah menyelenggarakan pertahanan untuk memelihara kedaulatan dan integritas wilayah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Azhar, loc.cit.

<sup>19</sup> al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadhi Bahri ( Jakarta: Darul Falah, 2000 ), hlm.1.

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *al-Mawardi dan Teorinya Tentang Khilafah*, Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN SuKa ( Yogyakarta: 1986 ), hlm. 14.



Dalam kitabnya *Adab al-Dunya wa al-Din* lebih jauh al-Mawardi menegaskan bahwa secara sosiologis dan praktis untuk mewujudkan kehidupan yang teratur dan selaras serta terhindar dari kezaliman dan saling bermusuhan diperlukan adanya suatu kekuasaan yang memaksa dan mengikat, karena menurutnya manusia cenderung memiliki watak bersaing dan saling menyikut dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan sebuah otoritas yang mampu mencegahnya, yaitu akal, agama dan kekuasaan, namun yang terakhir inilah yang paling efektif dan berhasil.<sup>21</sup> Sedangkan secara praktis menurut al-Mawardi agama sebagai kebutuhan sosial dan psikologis mempunyai fungsi kontrol dan kekuatan penjaga serta pemeliharaan yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat a-sosial dan merusak (*destruktif*).

Dalam disiplin ilmu filsafat sosial, masyarakat dipandang sebagai sebuah komunitas yang utuh dan komprehensif. Filsafat sosial adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pemikir secara filosofis sebagai usaha untuk mencari pola-pola atau pokok dasar yang mempengaruhi persoalan-persoalan perkembangan masyarakat dalam rangka mencari "*worldview*" tentang bentuk dan sistem sosial yang paling ideal.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, nampak bahwa studi pemikiran al-Mawardi, terutama konsepnya tentang filsafat sosial merupakan

---

<sup>21</sup> Al- Mawardi, op. cit., hlm. 194-196

kajian yang cukup menarik untuk ditelaah lebih jauh. Konsep al-Mawardi tentang kepemimpinan masyarakat yang ditulis dalam al-Ahkam As-Sulthaniyyah dan Adab al-Dunya Wa al-Din sebenarnya merupakan kesatuan pemikiran tentang filsafat sosialnya yang tidak dapat dipisahkan dari karya-karya lainnya. Namun pemikiran al-Mawardi yang lain hanya akan disinggung sejauh mendukung alur pembahasan.

Secara lebih rinci, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana filsafat sosial al-Mawardi
2. Apa peran dan fungsi Agama dalam konstruksi sosial masyarakat yang ia tawarkan

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagaimana tercantum di atas, kajian / penelitian ini berusaha menelaah serta mengkaji secara kritis dan filosofis pemikiran al-Mawardi. Dari situ diharapkan muncul pemahaman yang cukup mendalam dan komprehensif tentang pandangan filsafat sosialnya serta seberapa jauh kontribusi agama terhadap pembentukan sosial masyarakat.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoretis maupun praksis.<sup>22</sup> Secara teoretis, penelitian ini akan menjadi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum

---

<sup>22</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Woodhouse, bahwa sebuah penjelasan ilmiah, terutama dalam wilayah penelitian filsafat, mempunyai dua tujuan spesifik sekaligus yaitu: praksis dan teoritis. Lihat Mark B. Woodhouse, *Berfilsafat: sebuah Langkah Awal* ( Yogyakarta: Kanisius, 2000 ), hlm. 37.

dan ilmu keislaman secara khusus terutama studi ilmu-ilmu sosial serta filsafat sosial. Dan secara praksis, sebagai sebuah landasan teoretis dan epistemologis, penelitian ini tentunya diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berharga, dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah masyarakat yang ideal, demokratis guna terciptanya iklim sosial yang sejuk saling menghargai dalam rangka mewujudkan harmoni dan kebahagiaan hidup. Selain itu juga untuk menambah khazanah kepustakaan, khususnya tentang pemikiran tokoh Islam dalam ilmu-ilmu sosial.

Terakhir, yang teramat penting bagi penulis, bahwa penelitian ini secara legal formal memiliki nilai kegunaan, yakni untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan S1 di bidang filsafat pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karena skripsi menjadi syarat sahnya seorang mahasiswa mendapat gelar kesarjanaan, dan skripsi ini dibuat untuk keperluan tersebut

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada sekitar tahun 1969, Jamil Ahmad, seorang wartawan dan ilmuwan pakistan terkenal, menulis buku: *Hundred Great Muslims*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh pustaka firdaus dengan judul: *Seratus Muslim Terkemuka*, dalam buku tersebut terekam beberapa penelitian mengagumkan tentang para penyair, ahli filsafat, ilmuwan, negarawan, prajurit dan penjelajah muslim termasyur. Dalam buku tersebut al-Mawardi hanya dibahas secara biografis dan beberapa pokok pemikirannya secara general. Sementara dalam bukunya: *Etika dalam Islam*, Madjid Fakhry secara khusus mengupas pemikiran moral al-Mawardi,

terutama sebagaimana yang ada pada karyanya: *Adab al-Dunya Wa al-Din*, namun pembahasan tersebut masih terkesan resume walaupun disertai telaah evaluatifnya. Dalam tulisan tersebut sama sekali belum disinggung masalah yang menyangkut proses pembentukan masyarakat.<sup>23</sup>

Akhmad Patah dalam tesisnya yang berjudul *Konsep-konsep Pendidikan al-Mawardi* lebih menekankan penelitian pada konsep dan gagasan al-Mawardi dalam dunia kependidikan dan moral yang dimuat dalam kitab *Adab al-Dunya Wa al-Din*. Dalam kajiannya saudara patah lebih menekankan pada sejauh mana al-Mawardi sebagai seorang pemikir muslim memberikan kontribusi positif dalam wilayah tarbiyah.

Sedangkan Abdul Fatah Asyur, dalam tulisannya yang dimuat *At-Turas al-Insaniyah* menggagas tentang pemikiran politik al-Mawardi dalam: *al-Ahkam as-Sulthaniyyah li al-Mawardi*. Secara singkat Abdul Fatah sempat menyinggung tentang bagaimana suatu komunitas diatur melalui mekanisme politik. Namun dia lebih menyoroti pada sejauh mana konsep politik al-Mawardi ikut serta dalam pemecahan persoalan kepemimpinan dalam kehidupan sosial.

Tidak jauh dari persoalan politik Syamsul Anwar seorang dosen IAIN Sunan Kalijaga, membahas tentang konsep Khilafah al-Mawardi yang disampaikan dalam diskusi rutin dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1986, dalam pembahasannya Syamsul Anwar lebih menyoroti konsep kepemimpinan Islam model

---

<sup>23</sup> Akhmad Patah, "*Adab Al-Dunya Wal-din, Aspek Pendidikan*" ,Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 1997, hlm.6.

Khalifah, mulai dari makna dan arti khalifah sampai pada seluk beluk mekanisme pengangkatan dan tugas-tugas khalifah.<sup>24</sup>

al-Mawardi sebagai filosof muslim memang lebih dikenal pemikirannya dalam bidang politik, terutama tentang konsep khilafahnya dalam al-Ahkam As-Sulthaniyah, kajian-kajian mengenai dirinya lebih banyak menyoroti wilayah tersebut, begitu juga yang dilakukan oleh Muhammad Azhar dalam bukunya Filsafat politik, perbandingan antara Barat dan Islam. Dalam pembahasannya ia ingin membandingkan konsep filsafat politik antara para pemikir barat dan Islam, disitu al-Mawardi disinggung secara singkat mengenai latar belakang kehidupan dan pemikirannya dalam bidang politik selain para pemikir Islam yang lain seperti al-Farabi dan al-Ghazali. Dalam kajian tersebut ditemukan bahwa, ternyata dari tinjauan historis pemikiran al-Mawardi tentang kontrak sosial lebih dulu daripada para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Locke dan Rousseau. al-Mawardi hidup pada awal abad XI sementara mereka mereka baru memunculkan teori kontrak sosial pada pertengahan abad XVI.<sup>25</sup>

Lebih jauh Azhar juga menyimpulkan bahwa, al-Mawardi merupakan satu-satunya pemikir politik Islam sampai abad pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti di tengah jalan kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya dengan baik, yang disebabkan oleh persoalan moral misalnya maupun persoalan lainnya. Namun disitu al-Mawardi dikatakan belum memberikan sistem atau mekanisme yang jelas soal itu.

---

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm. 1- 4.

<sup>25</sup> Muhammad Azhar, *op.cit.*, hlm. 180.

Dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan penulis, praktis tidak ada yang membahas tentang konsep sosial al-Mawardi, paling banter pembahasan yang ada menyangkut wilayah politik. Apalagi pembahasan dalam bidang filsafat sosial, sejauh pencarian belum ditemukan. Hal ini membuktikan bahwa pembahasan pemikiran al-Mawardi dalam wilayah Filsafat sosial masih menarik dan laik untuk dikaji lebih lanjut.

Berangkat dari penelusuran pustaka di atas, kajian ini akan berbeda, karena penulis akan lebih mengungkap pandangan filsafat sosial al-Mawardi, terutama menyangkut kontrak sosial dan etika kemasyarakatan secara mendalam dan menyeluruh. Dimulai dari faham ketertiban sosialnya sampai sebisa mungkin mengkaji pada latar belakang pembentukan komunitas sosial yang digagas al-Mawardi. Namun bagaimanapun juga beberapa pembahasan awal yang telah dilakukan penulis di atas akan tetap penting dan bisa menjadi pelengkap dalam pembahasan nanti.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*), dalam arti bahwa data-data yang mendukung kajian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, majalah, jurnal, ensiklopedi, surat kabar dan sebagainya. Sedang pendekatan yang dipakai dalam kajian ini adalah memakai pendekatan filsafat sosial.

Dalam proses pengumpulan data-data tersebut, penulis mengupayakan data-data yang berkaitan dengan fokus kajian, baik yang berupa data primer maupun data

sekunder. Data primer dalam hal ini adalah karya al-Mawardi terutama : *al-Ahkam al-Shulthaniyyah dan adab al-Dunya Wa al-Din* serta karya-karya lainnya yang berkaitan dan mendukung pokok pembahasan. Sedangkan data sekunder adalah tulisan-tulisan lain yang membahas al-Mawardi, termasuk juga kajian atau tulisan yang membahas tentang pokok bahasan, filsafat sosial.

Dengan demikian, pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode *historis-faktual*, yaitu studi atas pemikiran tokoh, dalam hal ini pemikiran al-Mawardi tentang filsafat sosial. Sebagai sebuah studi pemikiran, maka obyek tersebut akan dikaji secara filosofis, dan tidak dipandang dari sudut sosiologis atau politis.<sup>26</sup>

Maka dengan demikian langkah-langkah metodis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Pertama, *diskripsi*, membahasakan hasil penelitian atau pembahasan sehingga ada kesatuan antara bahasa dan pikiran seperti badan dan jiwa, diskripsi merupakan salah satu unsur hakiki untuk menemukan *eidos* pada suatu fenomena tertentu. Di sini penulis akan mencoba mendiskripsikan dan membahasakan konsep pemikiran al-Mawardi tentang dimensi sosialitas manusia, kontrak sosial dan kedudukan agama dalam masyarakat secara lebih sistematis, ditinjau dari sudut pandang analisa filsafat sosial. Dimulai dari pandangan al-Mawardi tentang relasi manusia dengan lingkungan dan Tuhan sampai pada etika sosial keagamaan dalam konstruksi

---

<sup>26</sup> Anton Bakker dan Achmad Harris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* ( Yogyakarta: Kanisius, 1990 ), hlm. 61.

masyarakat. Dari sini diharapkan akan lahir pemahaman baru dan lengkap mengenai konsep pemikiran al-Mawardi.

Kedua, *Holistika*, merupakan corak khas dan suatu "kelebihan" dalam konsepsi filosofis, karena pada dasarnya filsafat berupaya mencapai kebenaran yang utuh, dalam hal ini subyek yang menjadi obyek studi, tidak hanya dilihat secara 'atomistis' yaitu secara terisolasi dari lingkungannya, namun sebaliknya dengan pendekatan ini obyek akan dilihat secara menyeluruh. Dengan metode ini penulis akan berusaha memaparkan pemikiran al-Mawardi secara lebih lengkap dan komprehensif. Artinya akan coba digali unsur-unsur yang mempengaruhi pemikirannya, baik lingkungan, latar belakang kehidupan dan sosio-kultural-politik dimana dia dibesarkan. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya manusia tidak bisa terlepas dari lingkup sosial-politik dan kultural dimana dia hidup sehingga dapat difahami melalui seluruh kenyataannya secara lebih adil dan lengkap.<sup>27</sup>

Ketiga, *Interpretasi*, upaya untuk menjelaskan fakta dan data yang ditemukan dalam pembahasan. Dengan ini penulis akan mencoba menyelami dan menelusuri karya al-Mawardi tentang filsafat sosialnya, agar kemudian dapat menangkap arti, nilai serta maksud yang dikehendaki. Sehingga dapat dicapai pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang pemikiran al-Mawardi tersebut.

Setelah melalui beberapa langkah metodis diatas, penulis akan mencoba semaksimal mungkin melakukan pengkajian secara *analitis-kritis-filosofis* terhadap

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 46.



pemikiran al-Mawardi tentang kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh pemahaman yang seimbang dan komprehensif.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bertolak dari berbagai hal di atas, untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap kajian ini, serta memperoleh gambaran yang jelas dan terarah serta sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan tersusun sebagai berikut :

Bab Pertama ( I ), Pendahuluan, yang menguraikan argumentasi terhadap pentingnya kajian yang dilakukan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua ( II ), Menguraikan sosok al-Mawardi, yang meliputi riwayat hidup serta perjalanan studi dan intelektualnya, lingkungan sosial-politik yang melatar belakangi, serta karya-karyanya.

Bab Ketiga ( III ), Berisi tentang penjelasan sejarah singkat dan definisi filsafat sosial, dalam bab ini akan dibahas tentang signifikansi filsafat sosial sebagai suatu kerangka teoretis.

Bab Keempat ( IV ), Merupakan pembahasan pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang pandangan dan konsep filsafat sosial al-Mawardi, yang memuat tentang relasi manusia, alam dan Tuhan, dilanjutkan dengan kosep al-Mawardi tentang filsafat sosial dan peran agama di dalamnya.

Bab Kelima ( V ) Sebagai bab penutup akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan serta saran.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

##### 1. Filsafat Sosial al-Mawardi

al-Mawardi mengandaikan filsafat sosialnya pada apa yang disebut negara dan masyarakat. Bagaimana suatu tatanan tersebut terbentuk dan bagaimana seharusnya terlaksana. al-Mawardi meyakini bahwa persoalan keduniaan merupakan fitrah yang harus dihadapi dengan seksama oleh manusia dengan landasan yang berkeselimbangan antara dunia dan akhirat.

Kebutuhan dasar untuk berserikat dan membentuk suatu kelompok bagi manusia merupakan gejala alamiah dalam struktur kosmologi *makro*, dan itu terjadi secara spontan. Spontanitas yang berkembang tersebut berawal dari suatu tuntutan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik berupa makanan ataupun keamanan. Kemudian pada tingkat menjaga kepentingan masing-masing inilah manusia akhirnya harus menjatuhkan pilihannya untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bersama.

Sedikit berbeda dari konsepsi yang digagas oleh para filosof Barat al-Mawardi berpendapat bahwa keberadaan Allah menjadi poros utama dari segenap sirkulasi sosial adalah suatu keniscayaan. Allah sengaja menciptakan manusia dalam keadaan lemah secara fisik dan menghadirkannya dalam suatu kondisi yang berbeda-beda. Dari kelemahan ini manusia menjadi sosok yang membutuhkan

bantuan baik dari Allah maupun manusia lainnya. Kemudian dari perbedaan, manusia terinspirasi untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihanannya.

Perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusialah yang merupakan pendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman dan kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Dengan demikian menurut al-Mawardi, lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak merekalah yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lainnya melalui kontrak sosial.

## **2. Peran dan fungsi Agama dalam konstruksi sosial masyarakat**

al-Mawardi adalah seorang ulama dan pemikir yang taat beragama. Ia senantiasa menyandarkan segala pemikiran dan beragam konsepsionalnya tentang kehidupan bermasyarakat kepada *grend naratif* Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan demikian agama --menurut al-Mawardi-- sudah seharusnya menjadi *inspirator* utama bagi manusia dan menjadi penuntun bagi jalannya manusia dalam menempuh kehidupan yang sebenarnya. Agama akan memberi jalan yang terang baik dalam bertindak maupun dalam berfikir, karena dalam agama terdapat petunjuk-petunjuk Allah yang banyak tidak terfikirkan atau tidak

mampu dipikirkan oleh manusia yang kapasitasnya tidak mungkin semutlak Tuhan, ia adalah mahluk dengan segala keterbatasannya.

Demikian halnya dalam proses pembentukan masyarakat yang tenteram adil dan makmur, agama --Islam-- dengan segenap ajaran dan nilai-nilai universalnya, menempati peran yang strategis di dalam pembentukan karakter dan moral masyarakat, karena dalam agama individu dituntut untuk melakukan berbagai kewajiban baik dia sebagai *khalifah* di bumi maupun sebagai *'abdullah*. Hal ini terbukti dengan kedua statusnya tersebut manusia sebagai mahluk individu sekaligus sosial memiliki sekian kewajiban yang diharuskan oleh ajaran agama untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam semesta. Karena pada dasarnya bangunan konstruksi masyarakat berada diatas elemen terkecil dari komunitas tersebut, yaitu individu; ketika seorang individu baik maka bisa dijamin baiklah masyarakat dimana individu tersebut berada.

## **B. Saran-Saran**

Skripsi ini, dari penelusuran pustaka dan karya tulis yang telah dilakukan merupakan sedikit dari sekian pembahasan yang ada mengenai filsafat sosial. Untuk itu kiranya sangat penting bagi para calon sarjana dan para akademisi Islam melakukan kajian lebih jauh dalam dunia pemikiran Islam klasik tentang gagasan dan ide-ide tentang filsafat sosial. Karena selain memang masih barunya disiplin ilmu ini dalam khasanah pemikiran dunia Islam, juga untuk membuktikan bahwa dalam literatur dan pemikiran tokoh-tokoh Islam terkandung berbagai ide universal yang sampai sekarang masih seringkali diklaim oleh dunia barat

Lain dari itu semoga tulisan singkat ini akan ada manfaatnya meskipun seperti setetes embun di tengah luasnya lautan orang-orang yang berilmu. Dan bagaimanapun pengangkatan al-Mawardi ini semoga bisa dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam membangun hidup yang Islami dan berkualitas. Karena pada dasarnya kebahagiaan dan kedamaian di dunia akan menjadi cermin pada kehidupan yang akan datang

*Wallahu a'lam.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *al-Mawardi dan Teorinya Tentang Khilafah*, Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap, Yogyakarta: 1986
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Harris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Budiman, Arief, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 2002
- Cahyadi, Hari, Tim Redaksi Driyarkara, *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Effendy, Bahtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang, 2001
- El-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa, Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Fakhry, Majid, *Sejarah Filsafat Islam*, terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Pustaka Jaya, 1987
- Hadiwijono, Harun, *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Kanisius, 1980
- Jean-Jacques, *Du Contrat Social, Perihal Kontrak Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989

- Johnson Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern jilid I*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987
- Khaldun, Ibnu , *Muqaddimah*, alih bahasa, Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Koenjtaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press, 1987
- Locke, John, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Essai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, alih bahasa; A. Widyamartaya, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Mawardi-al, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa: Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000
- \_\_\_\_\_ *Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama; Etika dalam Pergaulan*, terj. Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Machendrawaty, Nanih dan Safe'I, Agus Ahmad, *Pengembangan Masyarakat Islam, Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: Rosda, 2001
- Nugroho, Ito Prajna, *Dilema Negara-Bangsa dalam Perspektif Hannah Arendt* Jakarta: *Jurnal Filsafat Driyarkara*, edisi Th. XXVI, No.1, 2002
- Patah, Akhmad, "*Adab Al-Dunya Wal-din, Aspek Pendidikan*" , Tesis, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997
- Qur'an-al dan Terjemahannya, Jakarta: Muajamma' Al Malik Fath Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Muawwarah P.O.BOX. 6262, Kerajaan Saudi Arabia: 1415 H
- Ruswantoro, Alim, *Pengantar Filsafat Sosial*, sebuah pengantar kuliah, Magelang: 2001